

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Anisa A.N. Machmoed¹, Anderson G. Kumenaung², Audie O. Niode³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

E-mail: anisa.anastasya2@gmail.com

ABSTRAK

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu di era otonomi ini kemampuan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah harus berjalan dengan baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2010-2019. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2010-2019. Data ini dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan yaitu Pertumbuhan PAD, Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian, Rasio Belanja Operasi dan Rasio belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah bisa dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan PAD yang positif, rata-rata derajat desentralisasi yang rendah, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi rasio kemandirian keuangan daerah rendah dengan pola konsultatif, dan rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah masih mendominasi alokasi belanja dibandingkan rasio belanja modal.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Analisis Pendapatan, Analisis Belanja

ABSTRAK

Regional finance is one of the important aspects in regional economic development. Therefore, in this era of autonomy, regional financial capacity and regional financial performance must run well so that community welfare can be achieved. This study aims to determine the financial performance of the local government of North Bolaang Mongondow Regency in 2010-2019. This research is a case study research with data collection using documentation techniques. The data used is secondary data in the form of the North Bolaang Mongondow District Budget Realization Report 2010-2019. This data is analyzed using financial ratios, namely PAD Growth, Degree of Decentralization, Dependency Ratio, Independence Ratio, Operational Expenditure Ratio and Capital Expenditure Ratio. The results showed that in general the financial performance of the local government of North Bolaang Mongondow Regency was good. This is indicated by positive PAD growth, low average degree of decentralization, very high regional financial dependency ratio, low regional financial independence ratio with a consultative pattern, and the ratio of operating expenditure to total regional expenditure still dominates expenditure allocation compared to capital expenditure ratio.

Keywords: Financial Performance, Income Analysis, Expenditure Analysis

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Proses pembangunan meliputi berbagai aspek yaitu sosial, politik, ekonomi dan budaya. Pembangunan merupakan syarat penting bagi kemajuan suatu negara ataupun daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Todaro,2006). Kegiatan pembangunan akan dapat terwujud secara efisien, terpadu dan berkelanjutan apabila terdapat arah dan tahapan pembangunan yang jelas.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dilihat melalui APBD. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan sangat berpengaruh sekali terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu di era otonomi ini kemampuan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah harus berjalan dengan baik supaya kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Utara yang dalam pembangunannya disesuaikan dengan permasalahan didaerahnya serta didasarkan pada prinsip otonomi daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memegang peran penting dalam perekonomian, pemerintah memiliki kekuatan serta kemampuan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian. Salah satu faktor yang menjadi pendorong dalam percepatan pembangunan daerah yaitu belanja pemerintah dalam APBD. Secara spesifik belanja yang dimaksud adalah belanja modal.

Tabel 1.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondwo Utara
Tahun 2010-2019

No	Tahun	Belanja Modal	Belanja Operasi	PAD	Pendapatan Transfer
1	2010	160 088 367 240,00	119 087 471 840,00	9 100 523 492,00	307 933 004 784,00
2	2011	178 968 835 745,00	133 052 834 300,00	7 318 745 681,00	354 725 729 411,00
3	2012	91 678 270 776,00	224 764 442 816,00	6 609 732 752,00	327 225 273 381,00
4	2013	101 645 922 983,01	270 680 055 326,00	9 284 135 438,00	363 222 443 850,00
5	2014	98 523 038 547,00	293 811 427 471,00	10 303 880 083,00	407 919 394 507,00
6	2015	175 661 163 451,00	372 654 543 108,00	14 140 177 773,00	497 974 354 870,00
7	2016	187 832 947 517,00	366 380 295 271,00	17 828 737 030,00	550 562 795 002,00
8	2017	212 093 308 437,00	353 347 237 582,00	26 321 609 551,80	653 612 188 941,00
9	2018	169 215 839 686,00	398 438 254 891,00	16 425 467 982,94	667 364 153 320,00
10	2019	154 490 978 426,00	372 492 042 921,00	24 174 311 734,71	633 110 020 750,00

Sumber: BPKD Bolmut

Tabel 1. menunjukkan bahwa realisasi belanja modal di kabupaten Bolaang Mongondow Utara cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2010 berjumlah Rp. 160 188 367 240, kemudian di tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 178 968 835 745. Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi Rp. 91 678 270 776,00, meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi Rp. 101 645 922 983,01. Menurun kembali pada tahun 2014 menjadi Rp. 98 523 038 547,00. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali menjadi Rp. 175 661 163 451,00 dan terus meningkat sampai pada tahun 2017 menjadi Rp. 212 093 308 437,00. Akan tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi Rp. 169 215 839 686,00 dan konsisten pada angka Rp. 168 409 239 894,00 ditahun 2020. Terjadinya peningkatan belanja modal

pemerintah daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terutama dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, perkantoran dan rehabilitasi berbagai fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit dan sekolah. Tentunya hal tersebut sangat menopang percepatan pembangunan di daerah, yang kemudian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bolaang mongondow utara.

Pada Tabel 1. memperlihatkan secara jelas bahwa sumber pendapatan di Kaupaten Bolaang Mongondow Utara masih sangat bergantung pada Dana Transfer dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah sendiri masih sangat kecil dibandingkan Dana Transfer. Sebagai Kabupaten pemekaran baru sangat wajar apabila dana transfer masih mendominasi pendapatan daerah. Akan tetapi untuk mencerminkan semangat otonomi daerah tentu saja pemerintah harus berupaya agar kedepannya daerah dapat secara mandiri untuk tidak terlalu bergantung terhadap dana transfer. Agar nantinya percepatan pembanguana dapat dilakukan dan perekonomian di daerah semakin baik lagi tentu hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut (Sjafrizal:2018) perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia atau sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah capaian hasil dari kegiatan, program dan sasaran sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Menurut Bastian (2005:274) pengertian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja keuangan merupakan hasil realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akural yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan dalam mengelola keuangan (Darise, 2008).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartika sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Mamesa, 1995, dalam Halim,2007:23). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007:330).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Mardiasmo (2009:61) mendefinisikan anggaran adalah pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama satu periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pengertian APBD menurut Mardiasmo (2005), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrument kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan

dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pembangunan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Pembangunan Ekonomi

(Arsyad, 2004:13) Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perubahan sistem kelembagaan seperti ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya yang berefek pada perubahan struktural dan transformasi kelembagaan.

Penelitian Terdahulu

Dewi Purwanti Dude, Anderson Kumenaung Dan Debby Rotinsulu. (2014). Dalam Penelitian Yang Berjudul Analisis Kinerja Keuangan Dan Fiscal Illusion Pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2012. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara serta mendeteksi ilusi fiskal. Hasil Penelitian menunjukkan Dari hasil analisis rasio disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terus membaik. Hal tersebut terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rata-rata rasio efektifnya sebesar 106%. Selain efektif, kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara efisien dalam memberikan anggaran yang dialokasikan untuk biaya insentif untuk memungut Pendapatan asli daerahnya secara maksimal terlihat dari rata-rata rasio efisiensinya sebesar 2,87%. Walaupun demikian ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki trend negatif seperti rasio aktivitas dan pertumbuhan dimana rata-rata rasio aktivitas belanja rutin 99% sedangkan aktivitas rasio belanja pembangunan hanya sebesar 18%. Selain itu terdapat ilusi fiskal didalam kinerja keuangan Pemerintah Provinsi sulawesi Utara.

Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas. (2014). Dalam penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah

Daniel Frangky Sambow1 , George M. V. Kawung dan Avriano Tenda. (2016). Dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kota Manado. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Dari hasil penelitian dapat dilihat rasio kemandirian keuangan daerah dimana mulai mengalami tren positif setiap tahunnya bahkan tingkat pertumbuhannya dalam kurun waktu tujuh tahun mencapai peningkatan sebesar 8 %, yang pada tahun awal tingkat kemandiriannya hanya 10,8 % menjadi 30, 23 % pada tahun akhir penelitian.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series tahun 2010-2019 berupa data APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang bersumber dari instansi terkait dengan masalah dan variabel dalam penelitian ini, antara lain Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam memahami pengertian dan penafsiran konsep yang digunakan dalam analisis dan pembahasan maka beberapa batasan dan pengertian dasar dan konsep operasional dari variabel dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Belanja Modal, Seluruh belanja modal atau belanja pembangunan pemerintah daerah dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diukur dalam satuan milyar rupiah

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif deskriptif dan analisis kinerja.

Analisis pertumbuhan PAD bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan PAD secara positif ataukah negatif

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD Th } t - \text{PAD Th } (t-1)}{\text{PAD Th } (t-1)} \times 100\%$$

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah.

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Transfer} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta pinjaman daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Transfer pusat+provinsi}}$$

Analisis belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menunjukkan mengenai laporan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi} \times 100\%}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Analisis belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2.
Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2010-2019

Tahun	PAD	Pertumbuhan PAD
2010	9.090.042.609	9,09
2011	7.318.745.681	7,31
2012	6.609.732.752	6,61
2013	9.284.135.438	9,28
2014	10.303.880.083	10,31
2015	14.140.177.773	14,14
2016	17.828.737.030	17,82
2017	26.321.609.552	26,32
2018	16.425.467.983	16,42
2019	24.174.311.735	24,17
Rata-rata	14.149.684.064	14

Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan tingkat persentase rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 14%. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan positif yang terjadi selama tahun 2010-2019. Tingkat pertumbuhan PAD paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 26,32% dan pertumbuhan PAD paling rendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 6,61%. Berarti dalam kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk peningkatan PAD dari tahun 2010-2019 menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif.

Tabel 3.
Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2010-2019

Tahun	Total Pendapatan	PAD	DD
2010	3.463.51.126.676	9.090.042.609	26,24
2011	396.473.326.172	7.318.745.681	18,45
2012	336.203.237.259	6.609.732.752	19,65
2013	372.506.579.288	9.284.135.438	24,92
2014	418.763.274.590	10.303.880.083	24,6
2015	540.791.578.643	14.140.177.773	26,14
2016	640.722.162.032	17.828.737.030	27,82
2017	679.933.789.493	26.321.609.552	38,71
2018	694.013.341.303	16.425.467.983	23,66
2019	671.502.937.485	24.174.311.735	36
Rata-rata	509.726.135.294	14.149.684.064	27

Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan Tabel 3. di atas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami peningkatan rata-rata derajat desentralisasi selama 10 tahun adalah 27%. Persentase tingkat derajat desentralisasi yang paling kecil adalah tahun 2011 yaitu 18,45%, persentase tingkat derajat desentralisasi paling besar adalah tahun 2017 yaitu 38,71%..Itu berarti derajat desentralisasi menunjukkan trend yang positif. Dalam hal ini kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih dalam kategori rendah. Ini berarti pemerintah daerah belum mampu untuk menyelenggarakan dsentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah yakni PAD untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih baik.

Tabel 4.
Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2010-2019.

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Transfer	RKKD
2010	346.351.126.676	273.670.269.718	79,01
2011	396.473.326.172	292.245.668.532	73,71
2012	336.203.237.259	327.225.273.381	97,32
2013	372.506.579.288	363.222.443.850	97,5
2014	418.763.274.590	407.919.394.507	97,41
2015	540.791.578.643	497.974.354.870	92,08
2016	640.722.162.032	550.562.795.002	85,92
2017	679.933.789.493	653.612.188.941	96,12
2018	694.013.341.303	667.364.153.320	96,16
2019	671.502.937.485	633.110.020.750	94,28
Rata-rata	509.726.135.294	466.690.656.287	91

Sumber: data diolah 2021

Dari hasil perhitungan analisis ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 4, Menunjukkan rata-rata rasio ketergantungan adalah 91 %. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat/provinsi. Rasio ketergantungan menunjukkan perubahan yang mengalami penurunan dari tahun 2010-2014, penurunan ini bisa disebabkan karena komponen pendapatan transfer yaitu dana bagi hasil pajak mengalami penurunan akibat beberapa jenis pajak dialihkan sebagai pendapatan pajak daerah. Analisis ketergantungan keuangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan trend yang positif. Berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada dana transfer pemerintah pusat/provinsi. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah ini disebabkan masih rendahnya kontribusi PAD dibandingkan pendapatan transfer dalam total pendapatan daerah.

Pada Tabel 5. Rasio kemandirian keuangan daerah yang ditampilkan. menunjukkan peningkatan rasio kemandirian rata-rata yang masih rendah yaitu 29%, ini berarti kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih rendah dan memiliki pola hubungan konsultif.

Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2010-2019 menunjukkan trend yang positif. Meningkatnya pendapatan asli daerah ini disebabkan meningkatnya pajak daerah akibat munculnya jenis pajak baru dan meningkatnya lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Meskipun terjadi peningkatan pada rasio kemandirian keuangan daerah, hal tersebut masih belum dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah telah mandiri dalam keuangannya.

Tabel 5.
Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2010-2019

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	RK
2010	9090042609	273670269718	33,22
2011	7318745681	292245668532	25,04
2012	6609732752	327225273381	20,2
2013	9284135438	363222443850	25,56
2014	10303880083	407919394507	25,26
2015	14140177773	497974354870	28,4
2016	17828737030	550562795002	32,38
2017	26321609552	653612188941	40,27
2018	16425467983	667364153320	24,61
2019	24174311735	633110020750	38,18
Rata-Rata	14149684064	466690656287	29

Sumber : data diolah 2021

Pada Tabel 6. menunjukkan persentase rata-rata tingkat belanja operasi terhadap total belanja yaitu sebesar 62%, rasio belanja operasi terhadap total belanja paling tinggi terjadi tahun 2014 yaitu sebesar 74,87% dan rasio belanja operasi terhadap total belanja paling rendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 27,14.

Tabel 6.
Analisis Belanja Operasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2010-2019.

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	RBO
2010	96381640287	355048779622	27,14
2011	113161041921	400260639560	28,27
2012	224764442816	316591633617	70,99
2013	270680055326	372326055326	72,69
2014	293811427471	392391547018	74,87
2015	372654543108	504155686559	73,91
2016	366380295271	554479286450	66,07
2017	353347237582	566437166019	62,38
2018	398438254891	569045680897	70,01
2019	372492042921	527492042921	70,61
Rata-rata	286211098159	455822851799	62

Sumber: data diolah 2021

Rasio belanja operasi terhadap total belanja memperlihatkan garis trend yang positif. Berarti alokasi belanja pada belanja operasi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih lebih mendominasi.

Tabel 7.
Analisis Belanja Modal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2010-2019.

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja	RBM
2010	160088367240	355048779622	45,08
2011	178968835745	400260639560	44,71
2012	91678270776	316591633617	28,95
2013	101645922983	372326055326	27,3
2014	98523038547	392391547018	25,1
2015	175661163451	504155686559	34,84
2016	187832947517	554479286450	33,87
2017	212093308437	566437166019	37,44
2018	169215839686	569045680897	29,73
2019	154490978426	527492042921	29,28
Rata-rata	153019867281	455822851799	34

Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan Tabel 7. menunjukkan rata-rata belanja modal terhadap total belanja sebesar 34 %, tingkat belanja modal terhadap total belanja paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 45,08% dan tingkat belanja modal terhadap total belanja paling rendah terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 25,1 %. Ini menunjukkan garis trend yang negatif, yang berarti bahwa alokasi belanja pada belanja modal masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan belanja operasi, alokasi untuk belanja modal masih sangat cenderung belum menjadi prioritas karena tiap tahunnya alokasi untuk belanja modal lebih kecil dibandingkan alokasi untuk belanja operasi.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan hasil analisis kinerja keuangan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2010-2019 adalah:

1. Rasio Pertumbuhan PAD pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan garis trend yang positif
2. Derajat Desentralisasi keuangan daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2010-2019 menunjukkan hasil masih rendah
3. Rasio Ketergantungan keuangan daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2010-2019 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki ketergantungan yang sangat tinggi
4. Rasio Kemandirian pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2010-2019 menunjukkan hasil yang masih rendah dan memiliki pola hubungan konsultif
5. Rasio Belanja Operasi pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan hasil yang mendominasi pada belanja daerah
6. Rasio Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih cenderung rendah dibandingkan Belanja Operasi

Saran

Derajat Desentralisasi dan kemandirian yang rendah, ketergantungan yang sangat tinggi serta alokasi belanja terhadap belanja modal yang masih rendah merupakan masalah yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah daerah perlu untuk:

1. Meningkatkan PAD dengan cara memperluas basis penerimaan salah satunya dengan cara mengidentifikasi dan mengoptimalkan pembayaran pajak potensial dan retribusi daerah
2. Pengembangan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mendatangkan retribusi daerah yang cukup besar dan investasi BUMD
3. Memperhatikan alokasi belanja modal untuk membangun infrastruktur di daerah sebagai upaya percepatan pembangunan dan mencapai tujuan utama pembangunan yaitu mensejahterakan masyarakat
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB dari para investor yang masuk ke daerah. Dampaknya tentu sangat besar terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat sehingga akan meningkatkan kemampuan masyarakat terutama dalam membayar pajak
5. Memperbaiki kinerja BUMD sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
6. Mengoptimalkan pinjaman daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah agar tidak bergantung pada sumber pendapatan transfer dari pusat, tetapi pinjaman tersebut tidak sampai membebani APBD pada tahun berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. <https://bolmutkab.bps.go.id>.
- Dude, D. P. (2014). Analisis Kinerja Keuangan dan Fiscal Illusion pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 14, No 2 (2014) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4183>. Diakses Pada 22 April 2021
- Halim, Abdul. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Hidayah B, S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar). <http://eprints.unm.ac.id/13258/1/JURNAL%20SYAMSIDAR%20HIDAYAH%20B.pdf> . Diakses Pada 22 April 2021
- Jaya, I. P. N. P. K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol 7 No 1 (2014). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8643> Diakses Pada 22 April 2021
- Kaunang, C. E. (2016). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 1, No 4 (2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3407> Diakses Pada 22 April 2021
- Kemalasari, P. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Probolinggo (Tahun Anggaran 2002-2014). <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73753> Diakses Pada 22 April 2021
- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*. Vol 14, No 2 (2014) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4181> Diakses Pada 22 April 2021

- Siregar, H. A. (2016). Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan belanja modal sebagai variabel pemoderasi. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*. Vol 1 No 1 (2016). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/KURS/article/view/286> Diakses Pada 22 April 2021
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*. Vol 4, No 2 (2016). <http://www.jvi.ui.ac.id/index.php/jvi/article/view/101> Diakses Pada 22 April 2021
- Rasdalima, R. J. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. *EFISIENSI*, 17(01). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/16245> Diakses Pada 22 April 2021
- Sambow, D. F. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16, No 4 (2016) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13609>. Diakses Pada 22 April 2021
- Sitompul, T. R. (2019). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Setiap Kecamatan Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*. Vol 7, No 1 (2019).
- Sjafrizal. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Jakarta
- Suci, S. C., & Asmara, A. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 8-22. Vol 3 No 1. <https://doi.org/10.29244/jekp.3.1.2014.8-22> Diakses Pada 22 April 2021
- Syamsudin, S., Cahya, B. T., & Dewi, S. N. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 17(1), 15-27. <https://journals.ums.ac.id/index.php/dayasaing/article/view/2271> Diakses Pada 22 April 2021
- Ulfa, F. (2008). Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/4758/1/03220046.pdf> Diakses Pada 22 April 2021
- Wahyuningsih, Tri. (2020). *Ekonomi Publik*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Depok